PENGARUH KOMPETISI POLITIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*

(Studi pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2012-2015)

THE INFLUENCE OF POLITICAL COMPETITION, REGION OWN SOURCE REVENUE AND AUDIT OPINION ON IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT

(Study on Provincial Local Government in Indonesia year 2012-2015)

Rinda Dwi Utami[1], Dini Wahjoe Hapsari, S.E, M.Si., Ak., CA[2], Dewa Putra Krishna Mahardika, S.E, M.Si.[3]

[1,2,3]Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonimi dan Bisnis, Universitas Telkom
[1]rindadu@gmail.com, [2]dinihapsari@telkomuniversity.ac.id, [3]emaildosen@yahoo.com

Abstrak

***E-Government* merupakan suatu upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. *E-Government* sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, belum adanya pedoman mengenai pelaksanaan *e-Government* pada pemerintah daerah dan adanya kewenangan otonomi daerah menyebabkan pelaksanaan yang belum merata. Selain itu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi *e-Government* oleh pemerintah daerah.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi politik, pendapatan asli daerah (PAD) dan opini audit terhadap implementasi *e-Government*. Kompetisi politik diukur dengan jumlah anggota DPRD tingkat provinsi terpilih pada setiap periode. Pendapatan asli daerah diukur dari perolehan realisasi pendapatan asli daerah tahunan dan opini audit diukur dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah tahunan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan termasuk pada kategori deskriptif verifikatif. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu provinsi yang ada di Indonesia dan terdapat pada Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2012-2015. Pengujian hipotesis menggunakan metode statistik data panel pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Sedangkan kompetisi politik dan opini audit tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi *e-Government.*

***Keyword: e-government,* kompetisi politik, PAD, opini audit**

Abstract

E-Government is an effort to take advantage of information and communication technologies to improve efficiency, effectiveness, transparency, accountability, governance and public services. E-Government has begun to be implemented by the central government and local government. However, the lack of guidance on the implementation of e-Government on local authorities and their local autonomy cause uneven implementation. In addition there are other factors that may affect the implementation of e-Government by local government.

This study aims to analyze the influence of political competition, region own source revenue (PAD) and audit opinion on implementation of e-Government. Political competition is measured by the number of elected provincial legislators in each period. Region own source revenue measured from annual local revenue realization and the audit opinion measured by* BPK *examination of annual local financial statement.

This study uses quantitative method and descriptive verification. Samples were selected using purposive sampling method, the provinces in Indonesia that present on the E-Government Ranking Indonesia (PEGI) in 2012-2015. Hypothesis testing using statistical methods of data panel at a significance level of 5%.

The results showed partially that the region own source revenue had an influence on implementation of e-Government. While political competition and audit opinion had no significant influence on the implementation of e-Government.

Keyword: e-government, political competition,* PAD, *audit opinion.

1. Pendahuluan

E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, *e-Government* di Indonesia masih mengalami perkembangan. Pemerintah sendiri masih merancang pedoman yang baku untuk penerapan yang merata di seluruh pemerintahan Indonesia. Implementasi yang belum merata dapat disebabkan oleh adanya hambatan yang berbeda di setiap daerah. Ada banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan *e-Government* di negara berkembang. Persoalan mendasar di dalam penyelenggaran *e-Government* tersebut yaitu pertama, inisiatif dan pemaknaan implementasi *e-Government* oleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs *web* daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah mengidentikkan implementasi *e-Government* hanya sekadar membuat situs *web* pemerintahan daerah saja *(web presence)*[6].

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mulai melaksanakan *e-Governement. E-Government* diterapkan pemerintah mulai dari tingkat kementerian, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan. Untuk mengukur implementasi *e-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) mengadakan pemeringkatan *e-Government* berdasarkan 5 kriteria. Lima kriteria tersebut yakni kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Adanya indeks pemeringkatan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, sebagai dorongan peningkatan TIK dilingkungan pemerintah dan melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Implementasi *e-Government* jika dilihat dari Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tingkat provinsi tahun 2012 hingga tahun 2015, masih banyak provinsi yang memperoleh kriteria kurang. Berikut grafik Pemeringkatan *e-Government* tingkat provinsi tahun 2012-2015 :

Grafik
Pemeringkatan *E-Government* Tingkat Provinsi Tahun 2012-2015

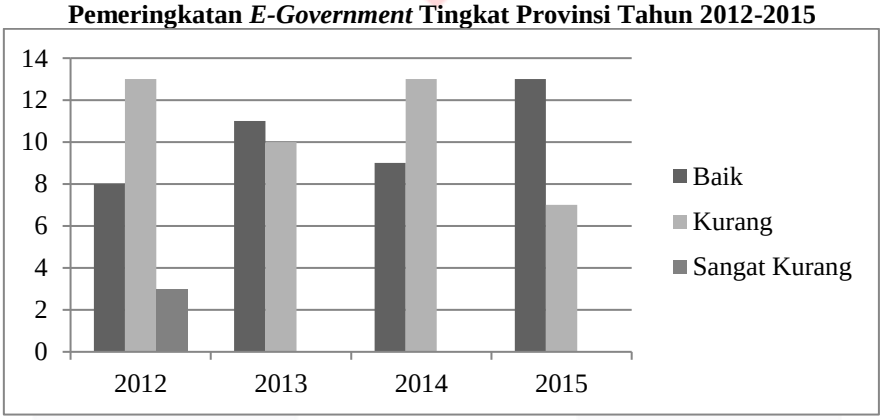

Sumber: Pemeringkatan e-Government Indonesia KEMKOMINFO (data diolah)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa masih banyak provinsi yang memperoleh kriteria kurang bahkan sangat kurang. Pada tahun 2012, terdapat 15 provinsi dengan kriteria kurang dan 3 provinsi pada kriteria sangat kurang. Di tahun 2013 nilai PeGI mulai meningkat dilihat dari jumlah provinsi dengan kriteria kurang menjadi 10 provinsi. Secara umum PeGI mengalami penurunan nilai rata-rata pada tahun 2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015. Hal ini dapat dikaitkan dengan diadakannya pemilihan umum pada tahun 2014 yang mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat setelah pergantian struktur pemerintah daerah. Walaupun nilai rata-rata PeGI kembali meningkat di tahun 2015, masih ada 7 provinsi yang berada pada kriteria kurang. Hal ini menunjukkan perkembangan implementasi *e-Government* belum merata pada tingkat provinsi.

Salah satu bentuk implementasi *e-Government* yaitu pengungkapan melalui *website* pemerintahan daerah, tidak hanya terbatas pada pengungkapan informasi keuangan saja tetapi termasuk pengungkapan informasi non keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit.

Kompetisi politik secara umum dapat dipahami sebagai tingkat daya saing untuk menduduki suatu jabatan strategis pada pemerintahan. Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah bersama DPRD mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sehingga banyaknya anggota DPRD terpilih yang bertugas akan mempengaruhi pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan tersebut meliputi operasional pemerintahan, termasuk pelaksanaan *e-Government*. Sejalan dengan teori agensi dimana masyarakat sebagai prinsipal dan para anggota dewan sebagai agen, para politikus mengharapkan mendapatkan suara pemilih dari masyarakat lebih banyak, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih[1].

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan, sehingga besarnya pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi pemenuhan sarana prasarana dalam rangka pembangunann daerah. *E-Government* dalam penerapannya membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan jika kesejahteraan ekonomi daerah sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui implementasi *e-Government*[5]

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal[2]. Daerah yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) berarti telah menjalankan pemerintah dengan baik serta telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat dipengaruhi dengan adanya implementasi *e-Governmen*t, salah satunya dengan pegungkapan melalui *website* daerah. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dinikmati masyarakat secara terbuka.

2. Tinjauan Pustaka Penelitian

2.1 Implementasi *E-Government*

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi[3].

Pada penelitian ini implementasi *e-Government* diukur menggunakan indeks Pemeringkatan Implementasi *e-Government* (PeGI) yang diselenggarakan oleh Direktorat *e-Government*, Ditjen. Aplikasi Informatika-Kementrian Komunikasi dan Informatika (APTIKA – KEMKOMINFO) Republik Indonesia melalui penilaian dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut terbagi menjadi lima dimensi, yaitu kebijakan,kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

2.2 Kompetisi Politik

Kompetisi politik secara garis besar merupakan tingkat daya saing untuk menduduki suatu jabatan strategis pada pemerintahan. Banyaknya perangkat yang berhasil terlibat dalam posisi strategis ini dapat mengindikasikan semangat yang besar dan tingkat pengawasan yang tinggi dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Lembaga legislatif (DPRD) adalah lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien efektif, transparan dan akuntabel[1]. Sehingga pada penelitian ini kompetisi politik dapat diukur dengan jumlah anggota DPRD terpilih dalam suatu periode.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan, sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pemenuhan sarana prasarana dalam rangka pembangunan daerah. *E-Government* dalam penerapannya membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan jika kesejahteraan ekonomi daerah (dilihat dari perolehan PAD) sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui implementasi *e-Government*[5].

2.4 Opini Audit

Jumlah temuan yang sedikit akan menghasilkan opini audit yang menunjukkan pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar sehingga pemerintah daerah cenderung tidak akan menutup-nutupi informasi pelaksanaan pemerintahnya yang baik tersebut. Pengungkapan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan tersebut akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat, sehingga pemerintah daerah yang memiliki opini audit yang wajar tanpa pengecualian cenderung melakukan pengungkapan yang lebih banyak[4]. Pada penelitian ini diterapkan variabel *dummy* dengan ketentuan memberi nilai 1 untuk opini audit wajar tanpa pengecualian dan nilai

0 untuk opini audit selain wajar tanpa pengecualian. Data yang digunakan adalah berupa opini audit tingkat provinsi yang diperoleh dari *website* Badan Pengawas Keuangan setiap daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

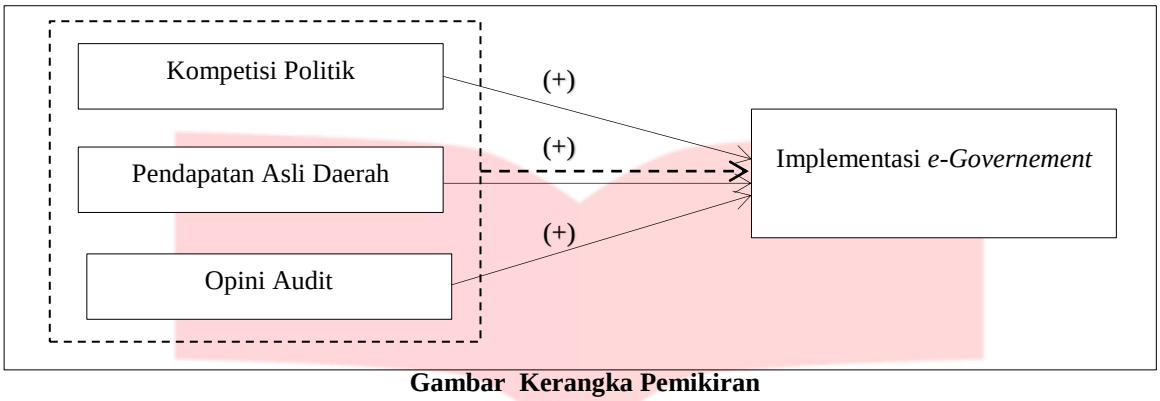

Gambar Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ : berpengaruh secara parsial

- - - - → : berpengaruh secara simultan

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

H1 : Kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap implementasi *e-Government*

H2 : Kompetisi politik berpengaruh positif secara parsial terhadap implementasi *e-Government*

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif secara parsial terhadap implementasi *e-Government*

H4 : Opini Audit berpengaruh positif secara parsial terhadap implementasi *e-Government*

3. Metodologi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat provinsi tahun 2012-2015. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria yaitu provinsi yang konsisten terdapat pada Pemeringkatan *E-Government* Indonesia tahun 2012-2015. Sehingga diperoleh data observasi sebanyak 52 yang terdiri dari 13 provinsi dengan periode penelitian selama empat tahun. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Persamaan analisis model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 1it + \beta_2 X_2 it + \beta_3 X_3 3it + e$$

Keterangan:

Y = Implementasi *e-Government*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisiean ragresi masing-masing variabel independen

X_{1it} = Kompetisi Politik

X_{2it} = Pendapatan Asli Daerah

X_{3it} = Opini Audit

e = *Error term*

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan Implementasi *E-Government* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit. Data yang digunakan adalah data daftar anggota DPRD tingkat provinsi terpilih, laporan realisasi anggaran pemerintahan daerah tingkat provinsi tahunan dan laporan hasil pemeriksaan BPK pemerintahan daerah tingkat provinsi tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hasil pengujian statistik deskriptif terdapat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Kompetisi Politik	PAD (dalam miliaran rupiah)	Opini Audit	Implementasi *E-Government*
Mean	75,384	5.936,332	0,634	2,565
Std. Dev.	22,743	8.157,550	0,486	0,490
Minimum	45	140,397	0	1,61
Maximum	106	33.686,177	1	3,39

Sumber : Data diolah

Rata-rata keseluruhan variabel kompetisi politik adalah 75,384 dan standar deviasi sebesar 22,743. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel kompetisi politik mengelompok atau tidak bervariasi. Dari 52 data, sebanyak 24 data berada dibawah rata-rata yang berarti jumlah anggota DPRD terpilih kurang atau sama dengan 75 orang.

Rata-rata PAD tahun 2012-2015 adalah sebesar Rp 5,936 triliun dan standar deviasi sebesar Rp 8,157 triliun yang menunjukkan data tidak berkelompok atau bervariasi. Dari 52 data, terdapat 36 data yang berada dibawah rata-rata yang menunjukkan PAD masih belum merata pada pemerintah daerah tingkat provinsi.

Rata-rata opini audit adalah 0,634 dan standar deviasi 0,538 menujukkan data berkelompok atau tidak bervariasi. Dari 52 data, terdapat 33 data yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian dan sisanya 19 data selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini mengggambarkan bahwa secara keseluruhan opini audit pemerintah daerah tingkat provinsi cenderung baik.

Rata-rata implementasi *e-Government* sebesar 2,565 dan standar deviasai sebesar 0.490 menujukkan data mengelompok atau tidak bervariasi. Dari 52 data terdapat 17 data yang memperoleh predikat kurang dengan nilai PeGI yang kurang dari 2.5. Sedangkan sisanya sebanyak 35 data sudah termasuk kategori baik.

4.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel Analisis Secara Simultan

Tahap pertama yang dilakukan adalah memilih antara model *fixed effect* atau *common effect* menggunakan uji Chow. Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai (*cross section chi-square*) dan (*cross section F*) masing-masing 0.0000 dan 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0.05. Sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk menentukan model yang paling sesuai antara *fixed effect* dengan *random effect* menggunakan uji hausman. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0.5530. Nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa penelitian ini menggunakan *random effect model*.

4.3 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian model yang dilakukan, maka penelitian ini menggunakan model *random effect*. Tabel merupakan hasil uji dengan model *random effect*.

Tabel 4.2
Hasil Uji *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KP	-0.009502	0.009206	-1.032064	0.3072
PAD	0.308065	0.138258	2.228185	0.0306
OA	-0.131453	0.105551	-1.245397	0.2190
C	-3.267987	2.372166	-1.377638	0.1747

Sumber: *Output Eviews* 8 (data diolah)

Berdasarkan data pengujian, dapat diketahui bahwa persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\mathbf{EGOV = -3{,}267987 - 0.009502KP + 0.308065PAD - 0.131453OA + e}$$

Persamaan regresi data panel dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3,267987 menunjukkan apabila variabel independen yaitu kompetisi politik tidak ada, pendapatan asli daerah bernilai nol dan opini audit tidak ada, maka implementasi *e-Government* pada pemerintahan daerah tingkat provinsi adalah sebesar -3,267987.
2. Koefisien regresi kompetisi politik (X_1) sebesar 0,009502 bertanda negatif menunjukkan jika terjadi kenaikan kompetisi politik dengan asumsi variabel lain konstan maka implementasi *e-Government* pada pemerintahan daerah tingkat provinsi akan mengalami penurunan nilai rata-rata pada Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI).
3. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (X_2) sebesar 0,308065 bertanda positif menunjukkan jika terjadi kenaikan pendapatan asli daerah dengan asumsi variabel lain konstan maka implementasi *e-Government* pada pemerintahan daerah tingkat provinsi akan mengalami kenaikan nilai rata-rata pada Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI).

4. Koefisien regresi opini audit (X_3) sebesar 0,131453 bertanda negatif menunjukkan jika terjadi peningkatan opini audit dengan asumsi variabel lain konstan maka implementasi *e-Government* pada pemerintahan daerah tingkat provinsi akan mengalami penurunan nilai rata-rata Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI).

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.3
R-squared* Metode *Random

Weighted Statistics			
R-squared	0.182948	Mean dependent var	1.014257
Adjusted R-squared	0.131882	S.D. dependent var	0.288800
S.E. of regression	0.269083	Sum squared resid	3.475471
F-statistic	3.582592	Durbin-Watson stat	1.965337
Prob(F-statistic)	0.020373		

Sumber: *Output Eviews* 8 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji metode *random effect* diperoleh bahwa nilai prob(*F-statistic*) sebesar 0.020373 < 0.05 maka H_0 diterima sehingga kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi *e-Government* pada pemerintahan daerah tingkat provinsi secara simultan.

4.4.2 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.182948 atau 18%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit mampu menjelaskan variabel dependen implementasi *e-Government* sebesar 18% sedangkan sisanya 82% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.4
Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KP	-0.009502	0.009206	-1.032064	0.3072
PAD	0.308065	0.138258	2.228185	0.0306
OA	-0.131453	0.105551	-1.245397	0.2190
C	-3.267987	2.372166	-1.377638	0.1747

Sumber: *Output Eviews* 8 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kompetisi politik (X_1) memiliki nilai probabilitas 0.3072 > 0.05, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_0 ditolak yang berarti kompetisi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi *e-Government*.
2. Variabel pendapatan asli daerah (X_2) memiliki nilai probabilitas 0.0306 < 0.05, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_0 diterima yang berarti pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi *e-Government* sebab perubahan pendapatan asli daerah mengakibatkan perubahan implementasi *e-Government*.
3. Variabel opini audit (X_3) memiliki nilai probabilitas 0.2190 > 0.05, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_0 ditolak yang berarti opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi *e-Government* sebab perubahan opini audit tidak mengakibatkan perubahan implementasi *e-Government*.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Implementasi *E-Government*

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, kompetisi politik memiliki nilai probabilitas 0.3072 > 0.5, maka sesuai dengan ketentuan H_0 diterima. Artinya kompetisi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Provinsi yang cenderung memiliki kompetisi politik dan PeGI kriteria kurang adalah Sulawesi Barat, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Baik kompetisi politik diatas rata-rata maupun

dibawah rata-rata, secara umum perolehan PeGI sudah pada kriteria baik. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah anggota DPRD tidak mempengaruhi implementasi *e-Government*. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang penentuan jumlah kursi anggota DPRD terpilih, kriteria perhitungan besarnya jumlah anggota didasarkan pada jumlah penduduk. Hal ini memungkinkan daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibanding daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Sehingga kemungkinan besar anggota DPRD belum menjadikan implementasi *e-Government* sebagai fokus utama yang dibenahi dikarenakan masih adanya permasalahan yang lebih mendesak untuk diatasi sebagai dampak dari jumlah penduduknya yang banyak.

4.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi *E-Government*

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, pendapatan asli daerah memiliki nilai probabilitas 0.0306 > 0.5, maka sesuai dengan ketentuan H_0 ditolak. Artinya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Dari 16 data PAD yang diatas rata-rata, hanya 1 data yang memperoleh PeGI kriteria kurang. Sedangkan dari total 36 data PAD yang dibawah rata-rata, sebanyak 16 data memperoleh PeGI kriteria kurang. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar PAD maka semakin besar pula nilai PeGI yang menunjukkan implementasi *e-Government* yang semakin baik. Jika kesejahteraan ekonomi daerah (dilihat dari perolehan PAD) sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui implementasi *e-Government*[5].

4.5.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Implementasi *E-Government*

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, opini audit memiliki nilai probabilitas 0.2190 > 0.5, maka sesuai dengan ketentuan H_0 diterima. Artinya opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Dari 39 data dengan perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), terdapat 14 data yang memperoleh PeGI kriteria kurang. Sedangkan dari 19 data dengan perolehan opini selain WTP, terdapat 5 data yang memperoleh PeGI kriteria kurang dan 14 data yang memperoleh opini non WTP telah memperoleh PeGI kriteria baik. Hal ini mengggambarkan bahwa hasil opini audit tidak mempengaruhi implementasi *e-Government* karena hasil opini WTP tidak memperlihatkan nilai PeGI yang lebih baik.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, secara simultan kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit berpengaruh secara signifikan terhadapat implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdapat pada pemeringkatan e-govenrment indonesia tahun 2012-2015. Secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdapat pada pemeringkatan *e-Government* tahun 2012-2015.

Saran untuk penelitian mendatang dapat menggunakan variabel dan objek lain agar implementasi *e-Government* dapat dipahami lebih mendalam. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, mengingat kebutuhan biaya yang besar dalam pelaksanaan *e-Government*. Sehingga sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi.

Daftar Pustaka

[1] Dewi, A. S., & Haryanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *e-Government* (Studi pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia). *Diponogoro journal of Accounting Vol.2 No. 4*, 1-15.

[2] Faud, M. R. (2015). *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

[3] Gunawan, C. I. (2015). *Sistem Informasi Manajemen dan E-Government.*Purwokerto: CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI

[4] Rahim, W. M., & Martani, D. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda dan Karaktersitik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Perpustakaan UI*.

[5] Sipatuhar, R. S., & Sutaryo. (2016). Faktor-Faktor Penentu Implementasi *E-Government* Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX.* Lampung.

[6] Sosiawan, et al. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta*.